

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA
DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS
DI PENGADILAN NEGERI SOLOK
(Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/Pn. Slk)**

Tesis

Diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas



**Oleh:
OKTA ZULFITRI, SH**

(NIM: 1720112056)

Komisi Pembimbing:

Prof. Dr. ELWI DANIL, S.H, M.H

Dr. FADILLAH SABRI, SH. MH

**Program Pasca Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Andalas**

Padang

2019

**Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Di Bawah
Ancaman Pidana Minimum Khusus Di Pengadilan Negeri Solok
(Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2014/Pn. Slk)**

(Okta Zulfitri, SH, No. BP 1720112056, Universitas Andalas, 120 hlm, 2019)

ABSTRAK

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia, angka sitaan barang bukti Narkotika dan Obat/bahan berbahaya (Narkoba) dan angka penyalagunaan Narkotika terus menunjukkan angka peningkatan yang mengkhawatirkan setiap tahun. Dalam mencapai tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, khususnya dari bahaya Narkotika, Pemerintah bersama DPR telah menerbitkan beberapa Undang-Undang untuk pemberantasan tindak Pidana Narkotika, terakhir Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat dengan UU No. 35 Tahun 2009). Salah satu perkembangan hukum baru dalam UU No. 35 Tahun 2009 untuk mencegah dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana Narkotika yaitu adanya pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009. Namun faktanya, dalam mengadili dan memutus perkara tindak pidana Narkotika, khususnya terkait pidana penjara, tidak selalu Hakim dalam putusannya memutus sesuai pidana minimum sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009. Khusus untuk daerah hukum Pengadilan Negeri Solok salah satunya dapat dilihat dalam tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa Agusri Panggilan Rini sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 40 / Pid.Sus / 2014 / Pn.Slk tanggal 17 Juli 2014, sedangkan dalam perkara lainnya dengan kualifikasi delik yang sama di Pengadilan Negeri Solok dijatuhi pidana oleh Hakim sesuai dengan ancaman pidana minimum dalam UU No. 35 Tahun 2009, dan hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif dalam bentuk pendekatan kasus (*case approach*), maka dalam penulisan tesis ini dibahas secara teoritis pembuktian tindak pidana Narkotika atas nama terdakwa Agusri Panggilan Rini di Pengadilan Negeri Solok, dan bagaimana pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam perkara tersebut. Kesimpulan yang diperoleh sebagai hasil penulisan tesis ini yaitu: Pembuktian tindak pidana Narkotika terhadap terdakwa Agusri Panggilan Rini di Pengadilan Negeri Solok telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP, yaitu pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dan pertimbangan hakim dalam putusannya menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 kepada terdakwa Agusri Panggilan Rini secara teoritis merupakan penerapan teori kemandirian atau kebebasan Hakim yang dihubungkan dengan teori keadilan dan teori tujuan pemidanaan, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa Agusri Panggilan Rini telah memenuhi rasa keadilan.

Kata kunci : Pidana minimum khusus, tindak pidana narkotika

***Judge's Cosideration Imprisonment Under Specific Minimal Criminal Sanction
In District Court Of Solok***

(Case Study Judge's Decision Number 40/Pid.Sus/2014/Pn.Slk)

(Okta Zulfitri, SH, No. BP 1720112056, Universitas Andalas, 120 hlm, 2019)

ABSTRACT

Base on the data from Indonesian Narcotic National Body and Indonesian National Police the number of confiscate Narcotic and Narcotics criminal offender continue to increase every years. To realize national purpose of Indoensian to protection all Indoensian people, exspecialy from dangerous of Narcotic, Indoensian Government and Representaion House of Indonesian has issued some law of Narcotics Dealer in Indonesian, the last law Narcotics Dealer in Indonesia that has issued is Narcotics Dealer Act Number 35 year 2009. One of the new concept in this Narcotics Dealer Act Number 35 year 2009 is specific minimal criminal sanctions that regulated in article 111 to article 126. But the fact, in Indonesian's court practice, Judge's decision were did not always obeying the limit of specific minimal criminal sanctions. One of the Court Judgment that were did not obeying the limit of specific minimal criminal sanctions in Narcotics criminal case as defendant of Agusrini in Judge's decision number 40 / Pid.Sus / 2014 / PN.SLK at July 17 2014 in District Cour Of Solok, meanwhile in District Cour Of Solok another Narcotic criminal case Judge's decesion in were obeying the limit of specific minimal criminal sanctions. This situation make uncertainty of the law. Base on the legal problems, by using normative approach in case approach, this research tries to analyze the proof of Narcotics criminal case is defendant of Agusrini in District Cour Of Solok, and the the judge's cosideration imprisonment under specific minimal criminal sanctions of article 111 section 1 Act Number 35 year 2009 by applied criminal law theory and other related law theory. The conclusions as the result of this research are: The proof of Narcotics criminal case is defendant of Agusrini in District Cour Of Solok hase fulfilled threshold proof in Indonesian procedure of criminal (Negatief Wettelijk); and the judge's cosideration in Court Judgment on Narcotics criminal case as defendant of Agusrini in District Cour Of Solok imprisonment under specific minimal criminal sanctions of article 111 section 1 Act Number 35 year 2009 has applied judges independent theory that connected to theory of justice and teory of punishment

Key word: specific minimal criminal sanctions, Judge's decesion